

B. Saran

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan terdapat beberapa saran yang penulis ajukan yaitu:

1. Diperlukan suatu sosialisasi yang lebih efisiensi agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa lebih berjalan secara maksimal.
2. Diperlukan suatu partisipasi masyarakat dalam peningkatan program APBDesa yang telah ditetapkan oleh kepala desa sesuai dengan aspirasi masyarakat desa Adiwerna untuk mewujudkan desa yang lebih transparansi dan akuntabilitas.
3. Dengan peningkatan pengawasan serta kapasitas seluruh pemangku kepentingan di desa, diharapkan terjadi perbaikan tata kelola pemerintahan desa serta pengawalan implementasi Undang-Undang Desa dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.W. Widjaja, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Abdul Rajak Husain, *Buku Pintar Tata Pemerintahan Republik Indonesia*, Solo: Cv Aneka, 1994.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011.
- Bambang Trisantono. 2010. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta. Fokusmedia.
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga. 2010.
- Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si, Drs, *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI, 2003.
- Widodo, Joko, *Good Governance: Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya, Insan Cendekia, 2001.
- Kartasasmita, Ginandjar, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta : Pustaka Cidesindo, 2001.
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Ndraha, Taliziduhu. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 2. Jakarta : PT Rineka Cipta. 2003.
- Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Santoso, Purwo. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sujarweni, V. Wiratna, *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Ulum, Ihyaul dan Ahmad Juanda. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Malang: Aditya Media Publishing, 2016.
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006.
- Wahab, Solichin A. *Analisa Kebijakan Dan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Malang: Bumi Aksara. 1990.
- Wasistono Sadu dan Tahir Irawan, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: Fokus Media, 2006.
- Widjaja. *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.
- Wrihatnolo, Randy R. Riant Nugroho Dwijowijoto. *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007.
- Yuliansyah, dan Rusmianto. *Akuntansi Desa*. Jakarta; Salemba Empat. 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa

Jurnal/Karya Ilmiah

Gunawan A. Tauda, “*Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1, No. 2, Nopember 2018, hlm. 415.

Kadek Wibawa, “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2 No. 2, Juni 2019, hlm. 230.

Khoiriah, S., & Meylina, U. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 20- 29.

Najoan, dkk. 2018. Evaluasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Tempang III Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Volome 1 No. 1 Tahun 2018.

Raharjo, Try, Sjamsuddin, Sjamsiar, dkk.. 2013. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2011 Di Desa Jembul Dan Desa Sumengko*

Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Jurnal Sosial dan Humaniora.
Volume 16 Edisi 1, hlm 64.

Saparingga. 2015. *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa Di Desa Jagoh Kecamatan Singkep Barat Tahun 2015.* Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 1 Edisi 1, hlm. 8.

Wahyuni, E. D., Mubaroq, G. K. & Latifah, S. W. 2019. *Analisis Efektivitas Sistem E-Village Budgeting Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Pada Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng).* Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 9, 96-101.

Website

www.bppk.depkeu.go.id/webpegawai/index.php.